

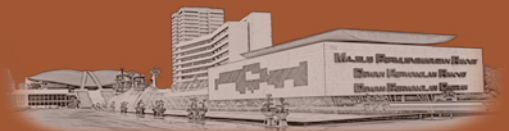


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 781/VII/2013

V/JULI 2013



Komisi V Tinjau Infrastruktur dan Transportasi Jelang Mudik Lebaran



KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR JULI - AWAL AGUSTUS 2013

Minggu-minggu terakhir Juli dan awal Agustus ini, kegiatan Dewan ditandai dengan ditutupnya Masa Sidang IV 2012-2013 ini pada Rapat Paripurna tanggal 12 Juli 2013. Dengan ditutupnya Masa Sidang IV ini maka DPR memasuki Masa Reses Persidangan IV 2012-2013 yang akan dibuka kembali pada 16 Agustus 2013. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 12 Juli 2013

Rapat Paripurna 12 Juli mengagendakan empat acara yaitu: [1] pandangan fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas APBN TA 2012, [2] laporan Badan Anggaran, mengenai hasil Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2014, [3] Laporan Badan Legislasi mengenai penambahan Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2013, dan [4] Pidato penutupan Masa Sidang IV.

Agenda pertama, mengenai pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas APBN TA 2012, disampaikan secara tertulis oleh masing-masing fraksi. Jawaban Pemerintah mengenai pandangan fraksi-fraksi ini dijadwalkan akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada 25 Agustus 2013.

Untuk agenda kedua, Laporan Badan Anggaran, disampaikan bahwa, berdasar UU MD3, Banggar bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan pendahuluan penyusunan APBN dan sesuai Tata Tertib, Pembahasan ini harus selesai paling lambat pada bulan juli. Menindaklanjuti UU dan Tata Tertib tersebut, maka Banggar DPR telah melakukan pembahasan dengan Menkeu, Men PPN-Kepala Bapenas, dan Gubernur BI pada 3 Juni-10 Juli 2013.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Untuk efisien pembahasan, dibentuk empat panitia Kerja, yaitu [1] Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2014; [2] Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2014; [3] Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2014; dan [4] Panja Kebijakan Transfer Daerah RAPBN TA 2014, dengan masing-masing panja dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dan telah melakukan pembahasan pada 1 dan 4 Juli 2013. Selain itu, disampaikan juga bahwa Komisi-Komisi telah melakukan pembahasan RKP tahun 2014 dan RKA K/L tahun 2014 dengan mitra kerjanya.

Pokok-pokok kesepakatan hasil pembahasan RKP tahun 2014 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 2014 adalah: tema RKP tahun 2014: *Mempertahankan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*; [2] RKP tahun 2014 ditekankan pada penanganan isu-isu strategis, antara

lain pemertahanan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik; [3] disepakati 11 prioritas nasional dan 3 prioritas nasional lainnya. 11 prioritas tersebut antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, dan lain-lain. Sementara 3 prioritas lainnya adalah prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, prioritas bidang perekonomian dan prioritas



bidang kesejahteraan rakyat.

Pada pelaksanaan tahun 2014, secara nyata antara lain melindungi [1] kegiatan-kegiatan tertuang pada *masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional Indonesia (MP3EI); [2] percepatan pengurangan kemiskinan melalui program empat klaster yang lebih efektif dan sinergis; [3] percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat serta Nusa Tenggara Timur.

Dan untuk agenda ketiga, yaitu Laporan Badan Legislasi mengenai penambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2013, disampaikan bahwa ada lima RUU yang disusulkan akan masuk prioritas prolegnas yaitu: [1] RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, [2] RUU tentang Hukum Disiplin Militer, [3] RUU tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, [4] RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan [5] RUU tentang Hak Cipta. Namun demikian, Rapat paripurna belum menyetujui penambahan RUU prioritas ini, dan masih akan dijadwalkan kembali setelah Fraksi-Fraksi mempelajarinya.

Untuk agenda Pidato Penutupan Masa Sidang IV, Ketua DPR mengawalinya dengan ucapan belasungkawa atas musibah gempa di beberapa wilayah di tanah air, antara lain di NTB dan baru-baru ini di Aceh, yang membawa banyak korban jiwa dan kerugian material. Dewan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BNPB Daerah, serta instansi-instansi terkait, dapat segera menanggulangi akibat terjadinya bencana alam tersebut.

Di bidang legislasi, Dewan telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU, yaitu RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, RUU tentang APBN-P 2013, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Ada sekitar 25 (duapuluh lima) RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I dan pembahasannya masih akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. RUU-RUU tersebut telah mendapat persetujuan untuk diperpanjang, baik yang ditangani oleh Komisi-Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus.

Di bidang anggaran, Dalam Masa Sidang IV ini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU tentang APBN-P TA 2013, termasuk perubahan asumsi dasar ekonomi makro untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global dan memperkuat struktur APBN agar terhindar dari beban subsidi yang relatif besar.

Di bidang pengawasan, sesuai dengan rekomendasi DPR-RI, Tim Pengawas Kasus Bank Century terus melakukan rapat-rapat untuk memantau perkembangan penanganan kasus ini oleh Aparat Penegak Hukum. Dewan mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi, namun Tim Pengawas belum melihat perkembangan yang signifikan, sementara telah ada tambahan dokumen dan data, serta hasil penyelidikan. Pada Masa Sidang ini, Dewan telah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Korpolkam ke PT. Freeport di Timika, sehubungan dengan kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Freeport, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 28 orang. Dalam kunjungan tersebut, delegasi telah mendiskusikan permasalahan kecelakaan kerja ini dengan PT Freeport Indonesia.

Masalah Sampang dan masalah TKI di Jeddah, juga menjadi sorotan Ketua DPR pada pidato ini. Selain itu, Ketua DPR juga menyoroti masalah pengurangan kuota haji sebesar 20%. Untuk masalah kuota haji, pengurangan kuota tersebut akan berdampak semakin panjangnya jadwal tunggu jamaah haji Indonesia. Karena negosiasi Pemerintah dan DPR RI dengan Pemerintah Arab Saudi terhadap kebijakan ini sudah final, maka Dewan meminta Pemerintah untuk berlaku adil dan menjelaskan secara transparan kepada para jamaah atas keputusan Pemerintah Arab Saudi.

Masalah lainnya yang menjadi keprihatinan Dewan adalah terjadinya kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah Riau. Dewan meminta Pemerintah untuk fokus mengatasi kebakaran hutan, bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku yang terkait masalah ini, serta segera melakukan tindakan antisipasi pencegahan agar kebakaran tidak terjadi di daerah lain.

Dalam hal kerja sama regional/internasional antar parlemen, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan dalam bentuk berbagai pengiriman delegasi ke pertemuan antarparlemen, antara lain *AIPA Caucus* di Vietnam, *AIFOCOM to Combat the Drug Menace* di Brunei Darussalam, *PUIC Executive Committee* di Azerbaijan, dan *IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* di Yordania.

Di akhir Pidato, Ketua DPR meminta kepada Pemerintah untuk lebih pro-aktif dalam menghadapi hari besar keagamaan ini. Kebijakan operasi pasar harus lebih tepat sasaran. Pemerintah agar serius menangani penyediaan transportasi massal, perbaiki infrastruktur dan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat. Permintaan ini khususnya berkaitan dengan aktifitas ekonomi di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.*

Komisi V Tinjau Infrastruktur dan Transportasi Jelang Mudik Lebaran



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau Bandara Juanda, Surabaya.

Komisi V DPR memberi perhatian serius terhadap kesiapan infrastruktur dan transportasi menjelang mudik lebaran, dengan mengirim tim kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat-Jawa Tengah terutama di jalur Pantura.

Tim Komisi V ke Provinsi Jawa Timur dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhidin M. Said sedangkan tim ke jalur Pantura dipimpin langsung Ketua Komisi Laurens Bahang Dama. Sejumlah masalah ditemukan Komisi V DPR baik di bandar udara, di pelabuhan laut maupun pada moda transportasi darat.

Seperti adanya 477 perlintasan kereta api yang tidak ada penjaganya, angkutan darat yang melebihi kapasitas, begitu pula peringatan agar kapal laut jangan sampai kelebihan kapasitas serta jalanan masih banyak yang rusak. Komisi V DPR juga menyarankan, perlunya dibentuk Panitia Nasional menangani mudik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga berjalan lebih lancar dan aman.

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk memastikan manajemen Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jatim siap mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang arus

mudik dan balik Lebaran 2013. Sejumlah fasilitas bandara yang sedang diperluas menjadi perhatian komisi yang membidangi masalah perhubungan ini.

“Kita datang kesini lebih awal biasanya H-10, ini karena fokus kita ingin melihat langsung ke lapangan kesiapan Angkasa Pura, apa yang sudah dilakukan untuk melayani penumpang yang diperkirakan meningkat sampai 20 persen,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Muhidin M. Said kepada wartawan disela-sela kunjungan di Surabaya, Jatim, Senin (22/7/13).

Muhidin yang juga Wakil Ketua Komisi V memimpin rombongan 14 orang dari 9 fraksi untuk memeriksa sejumlah fasilitas diantaranya terminal luar negeri, terminal dalam negeri serta fasilitas baru hotel bandara. Secara umum politisi FPG ini menilai persiapan bandara terbaik kategori penumpang <20juta di Asean 2013 ini cukup baik.

“Kita tadi sudah keliling, berdialog dengan sejumlah pihak mulai dari pimpinan sampai petugas di lapangan seperti portir, saya pikir persiapan cukup baik,” papar wakil rakyat dari dapil Sulteng ini.

Sementara itu dalam penjelasannya GM PT. Angkasa Pura I Trikora Raharjo menjelaskan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan jumlah lalu lintas penerbangan, pihaknya telah siap beroperasi 24 jam.

Ia mengakui kesibukan bandara yang dipimpinnya meningkat pesat. Bahkan pada jam sibuk melayani 37 penerbangan perjam. “Kita berharap Komisi V mendukung penyelesaian Terminal 2 yang sedang dikerjakan,” ungkap Trikora yang bicara didampingi Danlanud Juanda Kol Laut (P) Sigit Setianta. (iky)

DPR Dukung Penyelesaian Terminal Bus Purabaya

Anggota Komisi V DPR RI Andi Muawiyah Ramly menyayangkan kenyamanan penumpang mudik Lebaran di Terminal bus Purabaya, Jatim, diperkirakan akan terganggu karena tumpukan material dan proses pembangunan yang belum tuntas. Ia meminta pihak manajemen dan Dinas Perhubungan memberi perhatian terhadap kondisi ini.

“Kita dukung terminal terbesar se-Asia Tenggara ini berbenah tetapi karena arus mudik lebaran diperkirakan naik sampai 20 persen kita minta kedatangan dan proses pembangunan ini seminimal mungkin mengganggu kenyamanan,” katanya saat meninjau kesiapan arus mudik bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi V di Jatim, Senin (22/7/13).

Ia juga menyayangkan tertundanya penyelesaian perluasan terminal karena anggaran yang telah ditetapkan ternyata tidak mencukupi. “Kita minta segera diusulkan *planning* anggaran yang baru agar terminal bisa cepat selesai. Ini kan total hanya perlu 20 miliar rupiah, nilai sebesar itu asal untuk kemashlahatan umat tidak masalah, kita dukung kok,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim ini.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR saat Sidak ke Terminal Purabaya.

Diantar Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Eddi Amd, Tim Kunjungan Spesifik Komisi V meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, ruang menyusui dan ruang baca. Ia juga memaparkan terminal yang berhasil meraih predikat terbersih se-Indonesia ini pada saatnya juga akan menerapkan penggunaan tiket elektronik.

“Saya lihat ruang untuk ibu menyusui cukup baik, tapi ruang tunggu penumpang lantai 2 terlalu panas. Ini tentu

tidak nyaman bagi ibu dan anak,” kata Hetifah anggota tim dari Fraksi Partai Golkar. Ia meminta manajemen terminal menyiapkan kipas angin tambahan di ruangan tersebut.

Baginya moda transportasi bus dan kapal laut merupakan andalan masyarakat kecil untuk perjalanan mudik lebaran mereka. “Inilah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan perhatian pada rakyatnya,” pungkask dia. *(iky)*

Koordinasi PU dan Perhubungan Buruk, Jalan Semakin Parah

Anggota Komisi V DPR RI Hetifah menilai salah satu pangkal kerusakan jalan di banyak tempat di tanah air adalah karena buruknya koordinasi antara dua kementerian yaitu Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Ia meminta kondisi ini mendapat perhatian serius segenap pihak.

“Jalan yang dibangun Kementerian PU tidak sesuai kebutuhan, sementara yang mengawasi penggunaan jalan Kementerian Perhubungan juga tidak efektif. Tidak heran kemudian muncul

wacana menggabungkan masalah ini pada institusi baru Kementerian Transportasi,” paparnya dalam acara dialog radio ‘Bersama Wakil Rakyat’ kerja sama Pemberitaan Setjen DPR dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (19/7/13).

Sejumlah permasalahan kerusakan jalan di jalur Pantura dan Lintas Timur Sumatera berawal dari pembangunan jalan yang tidak sesuai kebutuhan dan tonase kendaraan yang akan melewati. Jalan kemudian rusak sebelum



Anggota Komisi V DPR RI Hetifah.

waktunya karena para pengawas dari Kementerian Perhubungan ‘*main mata*’ dengan para pengusaha.

Salah satu terobosan menghadapi kondisi ini menurut Politisi FPG, langkah sejumlah daerah membuat aturan, perusahaan tambang dan perkebunan harus investasi membuat jalan sendiri.

“Peraturan ini perlu karena kegiatan pertambangan dan perkebunan termasuk pengangkutan alat berat itu sendiri betul-betul merusak jalan raya yang digunakan untuk kepentingan umum,” tandasnya.

Ia menambahkan sejumlah koreksi terhadap penanganan jalan di tanah

air saat ini dituangkan dalam revisi UU Jalan yang saat ini dibahas DPR bersama pemerintah. “Dalam revisi UU no.38/2004 tentang jalan, aspek sanksi, *over load*, pengawas jalan, dan sejumlah isu pokok lain akan diperbaiki,” demikian Hetifah. (iky) Foto: wy/parle.

Pembangunan Terminal 2 Juanda Agar Kedepankan Produk Dalam Negeri



Tim Kunjungan Komisi V DPR meninjau Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.

Anggota Komisi V DPR RI Roem Kono mengingatkan pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya jangan hanya mengejar kemegahan dan kemewahan semata. Setiap pihak yang terlibat mesti memperhatikan setiap konstruksi dan *design* harus mengedepankan produk dalam negeri.

“Jangan hanya berlomba-lomba memperlihatkan kemewahan tapi ternyata peralatan pendukung bandara

impor semua, apa kita bisa bangga berada didalam gedung seperti itu,” ungkapnya disela-sela kunjungan spesifik ke Provinsi Jatim, Senin (22/7/13).

Bersama 14 orang anggota tim kunjungan spesifik ia terlihat menanyakan sejumlah produk kepada pekerja terminal yang diproyeksikan selesai November 2013 untuk layanan domestik dan Februari 2014 layanan luar negeri. “Kita berharap komponen impor dalam proses pembangunan ini

hanya 15 persen,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi V dari FPD Agung Budi Santoso menyayangkan pembangunan terminal 2 hanya menambah 1 *runway*. “Perlu langkah berani untuk membangun sampai 3-4 *runway* karena perkembangan penerbangan kedepan akan sangat pesat,” ungkapnya.

Ia menyebut Bandara Juanda harus belajar pada pengalaman Bandara Soeta yang sekarang kesulitan mengatur kedatangan lalu lintas pesawat karena keterbatasan *runway*. “Seharusnya bisa diantisipasi

perkembangan sampai 25 tahun ke depan. Juanda tetap akan menjadi tersibuk terutama menuju kawasan timur,” imbuhnya.

Terminal 2 Bandara Internasional Juanda dengan luas terminal 45.500 m2 diharapkan dapat melengkapi terminal 1. Kapasitas apron hanya dapat menampung 15 pesawat lebih sedikit dari terminal 1 yang mencapai 31 pesawat. (iky)

DPR Minta Kementerian PU Evaluasi Perbaiki Jalur Mudik

Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta Kementerian PU (Pekerjaan Umum) harus melakukan evaluasi terkait perbaikan jalur mudik. Hal tersebut diungkapkan Marzuki kepada Parlemen-tariadi rumah Dinas Ketua DPR, Widya Chandra III Jakarta, baru-baru ini.

Marzuki sangat menyayangkan perbaikan jalur mudik yang dilakukan setiap tahun. Seharusnya, katanya, perbaikan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak dilakukan menjelang arus mudik lebaran, karena hal itu akan mengakibatkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pemudik.

“Saya tidak mengerti, mengapa perbaikan jalur mudik itu setiap tahun. Kalau alasan terkait anggaran seharusnya ada ruas-ruas yang dibuat mampu bertahan lama. Ini hampir setiap tahun selalu begitu terus. Seharusnya jalan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

itu dibuat bisa bertahan selama 10 tahun sampai 15 tahun tapi ini hampir setiap tahun dilakukan perbaikan. Oleh karenanya Kementerian PU harus melakukan evaluasi. Sehingga jangan

setiap tahun kita disibukkan dengan hal-hal demikian” ujar Marzuki.

Ditambahkannya, setiap tahun masalah tak pernah hilang terkait jalur mudik menjelang lebaran. Mulai dari jalan rusak yang cukup parah hingga jalan berlubang, aspal yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan memakan korban tewas.

Oleh karena itu Marzuki berharap, perbaikan jalur mudik tahun ini bisa menjadi yang terakhir kalinya dan dapat segera selesai sebelum digunakan pemudik. Karena selain rusak, perbaikan jalur juga menimbulkan penyempitan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan. (Wahyu/Ayu) Foto: wy/parle.

DPR Minta Otoritas Pelabuhan Cegah Kapal Kelebihan Kapasitas

Komisi V DPR RI meminta manajemen Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, Jatim mengawasi dengan ketat kapal yang akan mengangkut penumpang mudik Lebaran 2013. Kasus pemberangkatan kapal dengan penumpang melebihi kapasitas perlu dipantau untuk mencegah kasus kecelakaan di laut.

“Masalah *over load* penumpang kapal laut agar diperhatikan, kita mencatat sejumlah kecelakaan terjadi di laut karena beban melebihi kapasitas. Tahun ini jangan sampai ada yang lolos,” kata anggota Komisi V Bakri saat memantau kesiapan infrastruktur dan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (22/7/13).

Politisi FPAN ini memberi apresiasi terhadap rencana pembangunan terminal modern di pelabuhan yang banyak melayani kawasan timur Indonesia ini. Namun seiring dengan dipugarnya terminal Gapura Nusantara, ia mengkhawatirkan pelayanan di terminal sementara yang merupakan bekas gudang, tidak akan optimal.

“Tempat ini terasa panas, jadi tentu mempengaruhi kondisi penumpang. Fasilitas pendukung lain juga harus ada, toilet, tempat ibu menyusui serta hal-hal yang sifatnya



Tim Komisi V DPR meninjau kelaikan kapal yang akan digunakan saat mudik Lebaran di Pelabuhan Tanjung Perak.

urgent bagi penumpang harus disediakan,” tandasnya saat meninjau fasilitas terminal bersama 14 anggota tim kunjungan spesifik lainnya.

Sementara itu anggota Komisi V dari FPD Agung Budi Santoso meminta otoritas pelabuhan memikirkan solusi yang lebih manusiawi bagi calon penumpang yang rata-rata

sudah berada di pelabuhan sehari sebelumnya. “Perlu difikirkan sistem yang lebih baik agar calon penumpang tidak menunggu terlalu lama di pelabuhan, walaupun menunggu siapkan tempat yang layak mungkin seperti hotel bandara tapi yang lebih sederhana,” paparnya.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Tanjung Perak, Surabaya, I Nyoman Gde Saputra dalam penjelasannya menyebutkan terminal sementara dimodifikasi sedemikian rupa. “Pada saat padat kita akan menambah tenda diluar karena

memang biasanya banyak penumpang yang datang sehari lebih awal dari waktu keberangkatan. Kita juga menambah 8 mobil toilet dalam kondisi puncak ini,” imbuhnya.

Ia berjanji akan memberi pengawasan lebih ketat agar tidak terjadi kasus penumpang melebihi kapasitas. Saat ini pihaknya masih menunggu persentase penambahan jumlah penumpang yang diizinkan Dirjen Perhubungan Laut pada arus mudik Lebaran 2013 ini. (iky)

Komisi V Kaget 477 Pintu Perlindungan KA Tidak Dijaga



Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR Muhidin M. Said meninjau stasiun Pasar Turi Surabaya.

Tim Kunjungan Spesifik Peninjauan Kesiapan Infrastruktur dan Angkutan Lebaran 2013, Komisi V DPR RI terkejut-kejut mendapat informasi, ada 477 pintu perlindungan resmi kereta api yang tidak dijaga di wilayah Daops VIII. Sejumlah anggota mempertanyakan kondisi ini karena dinilai membahayakan pengguna jalan yang bersinggungan dengan rel kereta.

“Angka 477 pintu perlindungan KA tidak dijaga ditambah 126 pintu perlindungan liar, itu angka yang serius. PT KAI perlu memberi perhatian pada kondisi ini, apalagi angka kecelakaan di pintu perlindungan setiap tahunnya cukup tinggi, buktinya tadi malam di Lamongan terjadi kecelakaan di lintasan tidak dijaga, 3 meninggal,” kata anggota Komisi V Zulkifli Anwar dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan PT KAI Daops VIII di Stasiun Pasar Turi, Jatim, Senin (22/7/13).

Politisi FP Demokrat ini memberi solusi menjalin kerja sama dengan Pemda setempat karena ia meyakini sejumlah pintu perlindungan baru muncul karena proses pembangunan, termasuk perumahan yang berkembang pesat. “Kadaops VIII bagus-baguslah hubungan dengan Pemda. Datangi bupati, walikota, gubernur sampaikan apa yang tidak bisa dijaga. Kita tahu banyak perumahan sering membuka jalur perlindungan baru dan itukan izinnya diberikan Pemda,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi V Agung Budi Santoso meminta langkah segera perlu disiapkan terutama pada saat kedatangan kendaraan di jalan raya meningkat pesat pada saat Lebaran nanti. Disamping itu jangka panjang PT KAI perlu mempelajari dengan serius ide untuk meninggikan jalur transportasi rel ini.

“Saya mendapat informasi ternyata biaya membuat *underpass* dan *fly over* pada setiap persinggungan kereta api dengan kendaraan lain jauh lebih mahal dari pada kita naikkan saja semua jalur rel ini. Kita minta PT KAI lebih konkrit menggarap hal ini,” imbuhnya.

Direktur Operasi PT KAI Herlianto yang hadir dalam pertemuan tersebut mengakui sulit untuk menjaga seluruh pintu perlindungan. Pada saat arus mudik ini telah diambil sejumlah langkah diantaranya, menambah jumlah petugas terutama di perlindungan yang ramai pada saat Lebaran, memasang spanduk peringatan atau lampu tanda bahaya pada pintu yang tidak dijaga.

“Kira-kira beberapa menit sebelum kereta melintas lampu ini otomatis akan menyala memberi peringatan kepada siapa saja yang akan melintas,” kata dia. Pada bagian lain ia juga memaparkan pada Lebaran kali ini PT KAI meneruskan kebijakan tidak ada penumpang berdiri dan nama pemegang tiket harus sesuai KTP. “Langkah ini tahun lalu terbukti berhasil menghadang calo di stasiun dan terbukti meningkatkan kenyamanan penumpang,” lanjutnya.

Pertemuan ditutup dengan meninjau sejumlah fasilitas di Stasiun Pasar Turi. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Muhidin M. Said mendapat kehormatan untuk melepas kereta Kertajaya yang akan berangkat menuju Stasiun Senen, Jakarta. (iky)

Komisi V DPR : Susun Panitia Nasional Tangani Para Pemudik

Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mendesak Pemerintah menyusun kepanitiaan nasional khusus menangani pemudik dan melibatkan lintas sektoral dari Kementerian terkait.

“Kenapa tidak dibikin kepanitiaan nasional terkait mudik,” katanya kepada wartawan, saat meninjau Jalur Pantura bersama Tim Komisi V, Selasa, (24/7).

Menurutnya, semua skenario terbaik termasuk rekayasa lalu lintas sudah dilakukan namun ternyata masih banyak persoalan terkait mudik ini. “Misalnya saja Pasar Tumpah masih sulit diselesaikan dan melibatkan lintas kementerian,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, Korban lalu lintas pemudik semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggota DPR lainnya, Abdul Hakim (F-PKS) mengatakan, pada tahun 2013 ini ada kebijakan pemerintah



Tim Kunker Komisi V saat pertemuan dengan jajaran Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas.

yang memberikan fasilitas angkutan kendaraan bermotor melalui kapal laut dan kereta api. Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya kecelakaan pada tingkat lokal.

“Kebijakan tersebut dapat meningkatkan kecelakaan pada tingkat lokal, apakah ada langkah yang signifikan kurangi angka kecelakaan pemudik,” tanyanya.

Sementara, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Kombes Rusdi Hartono mengatakan, tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 lalu telah terjadi peningkatan sebesar 86 kasus terjadi pada jalur Pantura. Kendaraan terlibat 188 kasus. Sementara pada 2012 menjadi 322 kasus.

“Itu mengalami kenaikan 71 persen, dan melibatkan kendaraan roda dua sebesar 60-70 persen,” tambahnya. (si)

Kaget, Komisi V DPR Temui Mayoritas Truk Lebih Kapasitas



Tim Kunker Komisi V saat sidak jembatan timbang Indramayu, Cisarang.

Tim kunjungan Komisi V DPR mengaku terkejut saat Sidak jembatan timbang Indramayu, Cisarang. Pasalnya saat inspeksi mendadak tersebut tim menemui mayoritas truk kecil maupun besar melebihi beban muatan. Bahkan ditemui ada truk besar yang kapasitasnya sampai 40 ton.

“Ini harus ditilang, dan ditegakkan aturan supaya jalan jangan sampai diperbaiki terus menerus. Sementara dari sisi lain pelayanan bagi masyarakat harus terus diperbaiki,”

ujar Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Indramayu, Selasa, (23/7).

Menurutnya, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum harus saling koordinasi sehingga aturan dapat ditegakkan.

Khusus kesiapan jalan Pantura yang akan dilalui oleh Pemudik, dia mengakui masih adanya perbaikan dan penyempitan jalan, karena itu harus dibuat pelebaran sehingga dapat mengurangi kemacetan nanti.

“Secara umum Kementerian PU sedang melakukan perbaikan H-7 harus selesai semua, memang kita ada anggaran perbaikan jalan nasional. Kita mengharapkan Jangan sampai pemeliharaan dan kapasitas kendaraan bertolak belakang,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran perbaikan jalan nasional sekitar Rp. 1.2 triliun pertahun dan itu bukan dana *on call* tetapi anggaran rutin. (si)

Anggota DPR Optimis BPJS Siap Dilaksanakan Tahun 2014

Anggota DPR Ahmad Nizar Shihab mengatakan, Kementerian Kesehatan dalam hal ini PT Askes sudah siap bertransformasi mengenai pelaksanaan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014 mendatang. Persiapan telah dilakukan dengan baik, *roadmapnya* untuk men-

capai *universal health covered* itu lima tahun sejak ditetapkannya tanggal 1 Januari, akan bisa dicapai.

Diantaranya jumlah dokter akan ditingkatkan pada daerah-daerah pedalaman dan daerah kepulauan. Dan tidak kalah penting bahwa UU BPJS ini sangat terbantu dengan disahkannya UU tentang Pendidikan Kedokteran. Dimana disebutkan bahwa *internship* akan dilakukan selama satu tahun dan dianggap sebagai masa kerja para dokter.

“Saya optimis atas pelaksanaan BPJS ini kita akan capai. Ini komitmen bangsa untuk

mencapai kesehatan bagi seluruh rakyat. Di manapun lokasinya bahwa semuanya akan mendapatkan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat yang tidak mampu,” katanya.

Menurut Nizar, bagi yang tidak mampu termasuk fakir miskin iurannya dibayarkan oleh negara yang jumlahnya 86,4 juta sedangkan bagi yang mampu membayar iuran sesuai aturan yang ditetapkan.

Menjawab pertanyaan sejauh mana pemantauan DPR atas pelaksanaan BPJS ini, politisi Partai Demokrat ini mengatakan melalui rapat-rapat kerja dengan kemenkes dan pihak-pihak terkait serta pemantaun di lapangan. “Kami melihat bahwa sosialisasi sudah berjalan, tetapi belum cukup. Kita tidak boleh cepat-cepat merasa puas, harus lebih ditingkatkan lagi,” demikian anggota Dewan yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja ini. (mp)

foto:odjie/parle



Anggota Komisi IX DPR Ahmad Nizar Shihab.

DPR Pertanyakan Progres PLTA Batang Toru dan Pembangkit Belawan



Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Sumatera Utara, Bobby Adhityo Rizaldi (Fraksi Golkar) mempertanyakan progres PLTA 1, 3 dan 4 di Batang Toru dan progres persiapan pembangkit di Belawan untuk menerima gas Arun.

“Kami ingin menanyakan progresnya sampai dimana dan apa yang menghambatnya,” kata Bobby saat pertemuan tim dengan GM Pertamina dan GM PLN wilayah bagian utara serta BPH Migas Medan, Rabu malam (24/7).

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu, kata Bobby, Gubernur Sumut menanyakan hal tersebut. Jika sampai akhir tahun ini PLN tidak bisa menunjukkan progresnya, Gubernur Sumut minta pelaksana Batang Toru diswastakan saja.

“Sedangkan di Jakarta sendiri, PLTA Batang Toru ingin dimasukkan ke dalam RUPTL,” jelas Bobby.

Sementara, informasi yang didapatnya dari media, yang menghambat PLTA Batang Toru karena FSnya yang dilaku-

kan PLN itu tidak selesai-selesai.

“Untuk pembangkit di Belawan, kami ingin mengetahui bagaimana progres dan kesiapannya untuk menerima gas Arun,” imbuh Bobby. Karena di Jakarta, menurut Bobby tender sudah dilaksanakan dan pelaksanaan pekerjaan sudah akan dimulai di Arun. Pipa juga sudah akan dimasukkan dan estimasi awal 2015 kloter pertama sudah ada *first guest*.

“Jangan sampai infrastruktur sudah ada, tetapi pembangkit Belawan tidak bisa mengambilnya,” harapnya.

“Karena kami juga mendengar, semoga hanya isu saja bahwa PLN tidak mau ada gas di Arun,” tambahnya. Bobby menegaskan, bahwa proyek pembangkit di Belawan merupakan proyek nasional yang masuk dalam instruksi Presiden.^(sc)

Wamenkum HAM Hanya Buat Masalah



Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani didampingi mantan Menkum HAM Patrialis Akbar dalam acara Dialektika Demokrasi.

Menyusul kasus pembakaran lembaga pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta di Medan, banyak pihak menilai Kemkum HAM tidak optimal memperhatikan fasilitas LP. Paradigma dalam memandang para napi harus dirubah.

Demikian mengemuka dalam Dialektika Demokrasi di *Press Room DPR RI*, Kamis (18/7). Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani yang menjadi pembicara, mengatakan, langkah Wamenkum HAM Denny Indrayana dengan “blusukan” ke berbagai LP hanya menimbulkan masalah dan tidak membawa solusi apa pun.

Menurut Yani, Presiden salah menempatkan seorang Denny di birokrat. Dia lebih pantas di LSM, karena tidak mengerti dunia napi dan LP. “LP adalah tempat transisi, bukan tempat penyiksaan,” tandas Yani. Apa yang terjadi di Tanjung Gusta adalah imbas dari para-

digma yang salah dalam memandang para napi.

Persoalan over kapasitas yang terjadi di banyak LP di Indonesia, kata Yani, selalu menjadi masalah klasik. Untuk mengatasinya adalah dengan mengeluarkan sebanyak mungkin napi dari LP dan sedikit yang masuk LP. Mengeluarkan atau membebaskan napi tentu ada aturannya. Salah satunya dengan pemberian remisi yang adil kepada para napi.

Pembicara lainnya mantan Menkum HAM Patrialis Akbar, mengungkapkan, kerja sama LP dengan beberapa kementerian pernah dilakukan. Misalnya, dengan Kementerian Kesehatan soal penanganan napi yang sakit. Mereka harus gratis bila ingin berobat. Dengan Kementerian PU, membangun kerja sama untuk membangun fasilitas air bersih dan perbaikan fasilitas lainnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menyediakan lahannya untuk membangun LP baru agar tidak terjadi over kapasitas penghuni LP. Sudah ada 28 provinsi yang telah menawarkan semasa ia menjadi Menkum HAM. Sementara itu pembicara lainnya Anton Medan mantan napi, mengatakan, PP No.99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dicabut.

Sosialisasi PP tersebut tidak optimal dan mengundang kecemburuan sosial di LP. Sebelumnya kebijakan remisi telah membuat para napi tidak mau berbuat macam-macam selama di LP, karena berharap dapat remisi. Hanya persyaratannya kadang tidak bisa dimengerti para napi. Di sinilah peran para sipir untuk menjelaskannya. Untuk dapat remisi, napi tidak harus menjadi *justice collaborator* dengan Kepolisian atau Kejaksaan. ^{(mh)foto:wy,ry/parle}

Setjen DPR Terima Delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste



Karo Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko berjabat tangan dengan Delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste.

Dalam rangka tukar pikiran dan pengalaman, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima lima orang delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste. Setjen DPR yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko menekankan pentingnya peran Setjen dalam mendukung kinerja Parlemen.

“Parlemen tidak akan bergerak jika tidak ada Setjen, karena berfungsi sebagai *supporting system* bagi Parlemen. Sedangkan, Biro Humas dan Pemberitaan adalah salah satu unit kerja di Setjen DPR, yang bertugas mendukung Parlemen, dengan menjadi jembatan antara anggota Parlemen

dengan masyarakat luas,” jelas Djaka ketika memperkenalkan biro yang dipimpinnya kepada delegasi Timor Leste di ruang rapat Setjen, Kamis (18/7).

Selain itu, dalam paparannya, Djaka juga menjelaskan tentang *Website* DPR, *Majalah* dan *Buletin Parlemen*, serta *TV Parlemen* yang dikelola oleh Biro Humas dan Pemberitaan. Dengan adanya media ini, tambahnya, masyarakat dapat mengetahui kinerja wakil rakyatnya di Parlemen.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Penerbitan Dadang Prayitna. “Untuk mendukung itu, *TV Parlemen* juga bek-

erjasama dengan *TV Nasional*, yaitu *TV One*, *TVRI*, *Metro TV* dan *Berita Satu*. Untuk di *Berita Satu*, kita menyiarkan kegiatan Parlemen berdurasi 6 jam per harinya,” jelas Dadang.

Djaka menyatakan apresiasinya terhadap kunjungan ini. Menurutnya, kunjungan ini adalah salah satu bentuk kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan antar Setjen DPR dengan Setjen Parlemen negara lain, khususnya hari ini Timor Leste. Sebelumnya, Setjen DPR juga melakukan kunjungan ke negara lain.

“Kita belum ada rencana khusus berkunjung ke Timor Leste. Kebetulan Timor Leste sudah dua kali ke Indonesia. Mereka juga mengundang, nanti akan kami laporkan ke pimpinan. Ini penting untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada di Parlemen maupun Sekretariat Parlemen negara lain, sebagai acuan dan pembandingan, agar dapat meningkatkan kinerja Setjen DPR,” jelas Djaka.

Sementara itu, Pimpinan Delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste Jose Suarez menyatakan kunjungan ini dalam rangka untuk *training*, *sharing* pengalaman dan observasi. Dengan harapan, dapat menjadikan Setjen DPR RI sebagai referensi untuk Sekretariat Parlemen Timor Leste. Usai diskusi, rombongan delegasi melanjutkan kunjungan ke *Studio TV Parlemen*. (sf) Foto: *odjie/parle*.

BAKN DPR Desak BPK Serahkan Laporan Audit Kementerian/Lembaga

BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI mendesak BPK untuk menyerahkan laporan keuangan masing-masing kementerian/lembaga berbarengan dengan ikhtisar pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN, Teguh Juwarno kepada Parle baru-baru ini.

“Maksudnya ikhtisar itu adalah kumpulan laporan keuangan pemerintah pusat (ringkasan dari seluruh kementerian/lembaga) itulah yang dilaporkan BPK kepada DPR bulan Juni. Kita minta laporan per kementeriannya dilaporkan juga, karena itu akan jadi dasar penyusunan anggaran kita pada tahun

berjalan” jelas Teguh.

Dilanjutkannya, selama ini laporan keuangan per kementerian/lembaga baru disampaikan pada bulan September nanti, dan menurut Teguh hal itu sudah terlambat. Karena penyusunan anggaran dan program pada tahun



berjalan sudah dilakukan jauh sebelum bulan itu. Jadi selama ini penyusunan program dan anggaran pada tahun berjalan tidak berbasis pada hasil audit BPK per kementerian/ lembaga, namun hanya ringkasannya saja.

“Jadi kami di Senayan ini tidak memiliki dasar atau bukti untuk mengevaluasi dan menyusun anggaran/ program masing-masing Kementerian/ Lembaga. Kami minta laporan audit per kementerian/ lembaga itu diserahkan berbarengan dengan Ikhtisarnya (ringkasannya),” tegas Politisi dari Fraksi PAN ini.



Anggota BAKN DPR Teguh Juwarno.

Teguh mengatakan bahwa permintaan laporan tersebut sudah disampaikan kepada BPK, dan menurutnya itu tidak melanggar Undang-undang.

“Intinya, kalau Laporan ringkasan keseluruhannya saja sudah jadi dan sudah dilaporkan kepada kami, pasti dong laporan audit dari masing-masing kementeriannya juga sudah ada, dan kami mendesak agar itu dilaporkan kepada kami, untuk kemudian kami distribusikan ke masing-masing Komisi. Kami berharap begitu juga pada tahun-tahun berikutnya,” kata Teguh. (Ayu) Foto: wy/parle.

DPR Minta Presiden Moratorium TKI

Pimpinan DPR RI sepakat membuat surat kepada Presiden untuk melakukan Moratorium TKI. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie menindaklanjuti banyaknya kasus tenaga kerja Indonesia, terutama wanita yang mendapat ketidakadilan serta tindak kekerasan khususnya di negara-negara Timur tengah.

“Beberapa kali kunjungan keluar, saya mendengar dan melihat langsung pengaduan dari saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, mereka meminta moratorium TKI. Lalu saya rapatkan dengan Pimpinan DPR lainnya, akhirnya kita sepakat membuat surat kepada Presiden SBY untuk moratorium TKI. Banyak tenaga kerja kita, khususnya wanita yang mendapat ketidakadilan dan kekerasan, khususnya di negara-negara Timur Tengah,” ungkap Marzuki Ali ketika ditemui wartawan di rumah dinas Widya Candra, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ditambahkannya, karena banyak kejadian yang tidak ada titik temunya itulah, maka Marzuki meminta sebelum ada perjanjian yang menjamin memberikan perlindungan kepada TKI, Indonesia tidak perlu mengirim TKI.

Keprihatinan tentang banyaknya kasus ketidakadilan terhadap TKI dan jaminan perlindungan kepada TKI disampaikan juga oleh Marzuki dalam forum-forum parlemen internasional. Seperti halnya di forum Parlemen Is-



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

lam sedunia yang kebetulan Marzuki sebagai pemimpin forum tersebut. Selain itu juga kepada forum Parlemen ASEAN.

“Disana (forum Parlemen) kita melakukan deklarasi untuk memberikan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. Alhamdulillah seperti Malaysia akhirnya melakukan kerjasama atau MOU sebagai bentuk perlindungan. Arab Saudi juga sudah mengeluarkan Undang-undang tentang Tenaga Kerja,” ujar Marzuki.

Sementara itu, terkait dengan kerusuhan di Arab Saudi beberapa waktu lalu, Marzuki mengungkapkan bahwa sekitar 103 ribu TKI yang tidak ada dokumen lengkap sudah diberikan pemberian amnesti.

“Saya agak keras dalam membuat statemen, disana itu ada lima puluhan counter untuk mengurus dokumen, tetapi tidak ada pembicaraan lobby kepada otoritas Arab Saudi. Tanggal 3 Juli kemarin berakhir amnesti, lalu saya kumpulkan Menlu, Menkumham, Menakertrans, akhirnya amnesti diperpanjang sampai November. Dan saya akan kembali memanggil Menlu untuk memantau perkembangan kasus ini. Harapan dan cita-cita saya membangun Indonesia yang cerdas, sehat, Indonesia sejahtera dan bermartabat. Insya Allah semua itu akan tercapai dengan kerjasama dari semua pihak,” tegas Marzuki. (Wy/Ayu) Foto: wy/parle.

Siswono: Ada Konspirasi Menaikkan Harga Daging



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo.

Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo menilai, hiruk pikuk di balik kenaikan harga daging akhir-akhir ini merupakan permainan *supplier* dan

para importir. Ada konspirasi di balik semua itu agar daging impor asal Australia bisa masuk ke Indonesia.

Siswono menyampaikan hal tersebut saat dihubungi *Parlementaria*, Senin (22/7). “Harga yang tinggi sudah didesain. Ada konspirasi untuk menaikkan harga, karena daging sapi dari Australia lebih murah harganya. Jadi, yang untung *supplier* dan importir,” ungkap Siswono yang anggota F-PG ini.

Tampaknya, menurut Siswono, kondisi seperti ini sengaja diciptakan oleh para oknum yang ingin mengambil keuntungan besar di tengah melambungnya harga daging di pasaran. Saat harga daging melambung, mestinya pemerintah menekan harga daging sejak berada di rumah potong hewan

(RPH), bukan di pedagangnyanya.

Saat ini, para pedagang membeli daging dari RPH sudah sekitar Rp 85 ribu per kilogram. “Pedagang untung-nya kecil, karena harga di RPH sudah tinggi,” tandas Siswono. Siswono mengaku lebih setuju pada opsi kedua yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan menyiapkan sapi-sapi potong dengan tidak merusak harga pasar.

Lebih lanjut Siswono menuturkan, Bulog yang ditugasi mengelola impor daging tampaknya juga tidak ahli. “Bulog tidak punya keahlian soal impor daging. Malah mensubkontrakkan ke pihak lain. Bulog hanya diperalat oleh importir. Misi bulog untuk menstabilkan harga, bukan ambil untung.” (mh)

Foto: *wy/parle*.

Dewan Minta Polisi Bertindak Tegas Usut Kasus Kendal

DPR RI minta Polisi bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan anarkis. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Imam Suroso kepada Parlemen baru-baru ini terkait peristiwa *sweeping* yang dilakukan FPI yang disusul bentrokan dengan warga di Kendal, Jawa Tengah, hingga berakhir pada tewasnya tiga orang yang tertabrak mobil FPI.

Dikatakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, dengan adanya Undang-undang Ormas yang baru disahkan beberapa waktu lalu seharusnya selain dapat menjadi sebuah aturan bagi setiap ormas untuk melakukan aktivitasnya, juga dapat menjadi pegangan polisi untuk menindak tegas ormas yang bersifat anarkis.

“*Sweeping* di bulan suci Ramadhan itukan sebenarnya tugasnya aparat kepolisian, bukan tugas ormas tertentu, apalagi hal itu dilakukan dengan cara anarkis. Ini sangat menyedihkan ormas yang membawa nama agama, kok malah bertindak anarkis,” jelas Imam.

Ditambahkannya, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan lainnya, ia meminta agar kepolisian mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku. Apalagi sampai merenggut nyawa tiga orang.



Anggota Komisi III DPR Imam Suroso.

“Dalam bulan suci Ramadhan, kita harus bisa mengatasi permasalahan dengan hati dingin, tidak perlulah ormas itu berlebihan atau *over acting*,

yang wajar-wajar saja. Mereka (ormas) tidak perlu mengambil alih tugas kepolisian, karena itu pasti akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu perlu kearifan dan kedewasaan dari kita semua untuk mengerem dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan anarkis yang mengatasnamakan masyarakat, tetapi akhirnya malah meresahkan dan mengganggu masyarakat,” paparnya.

Selain itu,, ia juga berharap agar polisi juga mampu mengevaluasi diri dengan melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga kewenangan dan tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat tidak diambil alih oleh pihak lain.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPR RI Marzuki Alie di rumah dinas di Widya Chandra. Marzuki mengatakan bahwa Polisi harus berani bertindak tegas, karena tanpa adanya penegakan hukum yang baik maka akan terjadi hukum rimba.



“Kejadian tersebut sangat berbahaya, karena kita sebagai negara yang demokrasi tidak boleh main hakim sendiri, semuanya harus melalui proses hukum dan oleh karenanya penegak hukum yang harus bertindak

sesuai dengan undang-undang,” tegas Marzuki.

Sementara itu beberapa waktu lalu seperti yang dilansir berbagai media massa, Presiden SBY juga sudah

menginstruksikan pihak kepolisian agar mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kerusuhan di Kendal yang melibatkan Ormas FPI tersebut. (Ayu/Wahyu) foto:ry/parle

Polisi Harus Tindak Tegas Pelaku Main Hakim Sendiri

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat meminta pihak kepolisian untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindakan main hakim sendiri, ataupun yang mengambil alih peranan dan fungsi polisi. Hal ini terkait dengan kejadian aksi *sweeping* oleh salah satu organisasi masyarakat di Kendal, Jawa Tengah, yang menyebabkan jatuh korban.

“Kepada siapapun yang mengambil alih peranan dan fungsi polisi dengan main hakim sendiri tanpa menyerahkan tugas itu kepada polisi, harus ditindak. Sebab main hakim itu meski maksudnya benar, tetapi tindakan itu salah,” tandas politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini ketika ditemui tim Parle di Lobby Gedung Nusantara III, Selasa (23/7).

Martin menambahkan, jika peristiwa ini tetap dibiarkan, hal ini meng-

indikasikan tidak ada lagi kontrol dan peranan aparat kepolisian. Ia menilai hal ini sangat berbahaya, sehingga jika ada ormas atau kelompok main hakim sendiri, kuncinya harus segera ditindak.

“Tanpa tindakan tegas, nanti-nya akan banyak kelompok lain yang melakukan anarkis. Akan banyak orang yang main hakim sendiri menurut sel-eranya. Akibatnya, akan merepotkan semua pihak,” tukas Martin.

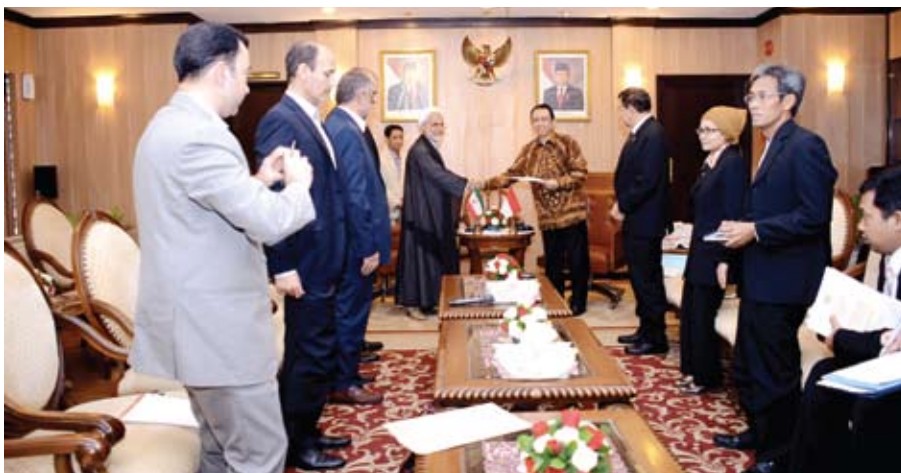
Ia mengingatkan, jika memang ada hal-hal yang dirasa mengganggu kenyamanan publik, sebaiknya melaporkan kepada pihak kepolisian. “Polisi harus didorong. Kalau perlu ramai-ramai datang ke kantor polisi, laporkan. Kalau kantor polisi didatangi puluhan orang, pasti akan bertindak. Intinya jangan bertindak sendiri sebab bisa terjadi konflik dengan masyarakat lain,” jelasnya.



Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat.

Sekali lagi menegaskan, polisi harus konsisten melaksanakan penegakan hukum termasuk sikapnya terhadap kelompok-kelompok yang melakukan main hakim sendiri. “Sikap tegas polisi memang sangat diperlukan,” tutupnya mengakhiri wawancara. (mp,sf) Foto: ry/parle.

Ketua DPR Diundang Hadiri Pelantikan Presiden Baru Iran, Hasan Rouhani



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Utusan Khusus Ketua Parlemen Iran.

Ketua DPR Marzuki Alie diundang untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran- Hasan Rouhani yang akan digelar tanggal 4 Agustus yang akan datang. Hasan Rouhani memenangkan pemilihan presiden Iran pada 14 Juni lalu, menggantikan Mahmoud Ahmadinejad yang telah memimpin negara itu sejak tahun 2005.

Undangan disampaikan Utusan Khusus Ketua Parlemen Iran Ali Larijani kepada Ketua DPR melalui Delegasi parlemen Iran yang dipimpin Vahid Achmad di Ruang rapat Ketua DPR Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan,

Jakarta, Rabu (24/7).

Ketua DPR yang didampingi anggota DPR Nizar Shihab dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti serta beberapa pejabat Setjen DPR menanggapi undangan tersebut mengatakan, akan mempertimbangkan dengan agenda yang ada di DPR apakah bisa hadir langsung atau diwakili oleh Pimpinan yang lain.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan harapan Ketua Parlemen Iran agar hubungan dengan Indonesia yang telah berjalan amat baik selama ini perlu ditingkatkan. Apalagi Indonesia dinilai mempunyai posisi yang penting di kawasan Asia juga dunia perlu mengambil sikap terkait dengan kejadian di Mesir dan Suriah serta bagian dunia lainnya. “Artinya dengan

hubungan yang lebih baik maka kita bisa berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan ini,” jelasnya.

Anggota DPR Nizar Shihab yang mendampingi Ketua DPR dalam pertemuan tersebut menambahkan, Parlemen Iran ingin menindaklanjuti kerjasama yang selama ini sudah dijalin. Misalnya pemberian bea siswa kepada 35 orang mahasiswa Indonesia segera dilaksanakan sehingga ke depan akan makin banyak mahasiswa dan dosen Indonesia yang belajar ke Iran.

Tentang kerja sama nuklir di bidang kesehatan, Parlemen Iran sangat mengharapkan segera bisa diwujudkan sebab kata Nizar Shihab, negara itu sangat maju. Selain itu kerja sama bidang pariwisata, masyarakat Iran lebih

banyak datang ke Indonesia dibanding warga Indonesia yang berkunjung ke Iran. Di bidang ekonomi, mereka berharap kerja sama lebih ditingkatkan lagi.

Menjawab pertanyaan mengenai program nuklir yang dikembangkan Iran, Ketua DPR mengatakan, sikap Indonesia tegas mendukung pengembangan nuklir untuk kepentingan damai. Sepanjang untuk kepentingan damai, untuk kemaslahatan umat Indonesia pasti mendukung. Tapi manakala pengembangan nuklir sifatnya untuk pembunuhan massal, tentu Indonesia tak memberi dukungan. “Sikap Indonesia konsisten, jelas mendukung pengembangan nuklir untuk kepentingan damai,” tandas Marzuki menambahkan. (mp) Foto: odjie/parle.

Komisi VII Pantau Ketersediaan Energi Jelang Lebaran

Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup, melakukan kunjungan spesifik ke Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu dan Kamis ini (24-25/7).

Kunjungan spesifik tersebut, menurut Ketua Tim yang juga Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dalam rangka memantau kesiapan ketersediaan pasokan BBM, gas, dan listrik menjelang lebaran di Medan.

Untuk itu, tim Komisi VII akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati se-Sumut, General Manager (GM) Pertamina, GM PLN, GM Angkasa Pura,



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

dan BPH Migas. Selain itu, tim juga akan melakukan peninjauan ke SPBU-

SPBU yang ada di Sumut dan ke LP. Tanjung Gusta.

Tim Komisi VII selain melakukan kunjungan ke Medan, juga menurunkan dua tim Komisi VII lainnya dalam waktu yang sama mengunjungi Jawa Barat dan Jawa Timur. Anggota Tim Komisi VII ke Medan antara lain Jhonny Allen Marbun (F-PD), Tri Yulianto (F-PD), Milton Pakpahan (F-PD), Dito Gaiduto (F-PG), Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG), Nazaruddin Kiemas (F-PDI Perjuangan), Muhammad Idris Luthfi (F-PKS), Asmin Amin (F-PKS), Jamaluddin Jafar (F-PAN), Agus Sulistyono (F-PKB), Mulyadi (F-Gerindra), dan Herry Lotung Siregar (F-Hanura). (sc) Foto: odjie/parle.

DPR dan Pemerintah Sosialisasikan UU Ormas

Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Deding Ishak, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kengbaspol) Kemendagri A Tanribali Lamo, Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wahiduddin Adams, dan Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Negara

Berkembang Kementerian Luar Negeri Harko Ananto, hadir pada diskusi Forum Legislasi dengan tema “UU Ormas,” di Pressroom Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2013). Diskusi ini menerangkan bahwa UU Ormas baru akan operasional setelah ditandatangani oleh

Presiden atau setelah sebulan sejak disetujui oleh DPR RI pada 2 Juli lalu.

Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Deding Ishak mengakui, UU Ormas yang baru disahkan ini lebih maju ketimbang UU ormas lama, yakni UU No 88 Tahun 1985. “Dalam UU Ormas, Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Sehingga Pancasila tidak ditafsirkan secara sepihak, makanya kita sepakat dengan empat pilar,” terangnya.

Menurut Deding, UU Ormas ini tidak anti demokrasi, karena itu sama sekali tidak memberikan ruang terhadap pemerintah untuk melakukan intervensi. “Makanya ada beberapa ayat dan pasal yang sempat dihilangkan. Jadi UU Ormas yang baru ini sangat berbeda jauh dengan UU No 88 Tahun 1985,” ujarnya.

Diakui Deding, perubahan yang signifikan pada UU Ormas baru ini, memang untuk menjawab berbagai kecemasan dan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait dengan penolakan masyarakat sipil. “Dalam hal ini, ormas dimasukan sebagai objek. Jadi masyarakat takut, bahwa pemerintah masih bisa bertindak secara otoriter,” tuturnya.

Yang jelas, kata Deding, dengan pengesahan UU ormas ini, maka tugas DPR sudah selesai. Tinggal bagaimana melakukan langkah-langkah untuk sosialisasi ke masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tanribali Lamo menerangkan bahwa Pemerintah segera menerbitkan enam Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sudah disahkan.

Adapun tiga PP yang sudah siap antara lain, PP Pendaftaran Ormas, PP Pemberdayaan dan PP Tata Cara Penyelenggaraan Izin Operasional Ormas. “Ketiga PP akan diterbitkan sekaligus dalam waktu dekat. Pemerintah sudah melakukan persiapan,” katanya.



Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Deding Ishak didampingi nara sumber lain dalam acara Forum Legislasi.

Menurut Tanri, sekitar tiga PP lainnya masih dalam kajian, antara lain PP soal Sistem Informasi, PP Tata Cara Pengawasan dan PP Penjatuhan sanksi. “Saat ini, ormas yang sudah terdaftar di Kemendagri mencapai 139.957 ormas. Dengan rincian, ormas yang tercatat di Kemendagri 65.577, Kemensos 25.406, dan Kemenkumham 48.886,” katanya.

Data itu, sambung Tanri, belum lagi ditambah beberapa ormas yang terdaftar di kementerian masing-masing. “Kemenuh saja sudah terdaftar 100.000-an, belum lagi ormas yang terdaftar di Kemenhut, dan lainnnya,” tegasnya.

Menurut Tanri, ada sejumlah perbedaan mencolok antara UU No 88 Tahun 1985 pada jaman Orba dengan UU Ormas yang baru saja disahkan. Pada UU ormas lama, lebih kental dengan kata pembinaan. Dimana aspek pembinaan ini lebih bernuansa intervensi pemerintah. Sedangkan UU Ormas baru ini, dasarnya hampir sama dengan partai politik dan pemerintah tak bisa melakukan intervensi. (as)Foto:odjie/parle

Manajemen Pangan Buruk, Harga Sembako Melambung Tak Terkendali

Meroketnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran sudah sangat meresahkan masyarakat. Sejumlah komoditas seperti daging, cabai, bawang, dan sayur-sayuran melonjak tak terkendali ini baru pertama kali dalam sejarah, sebab sebelumnya tidak pernah setinggi sekarang ini. Beban masyarakat kian

bertambah dengan kenaikan harga BBM, lebaran, dan memasuki tahun ajaran baru.

Menanggapi kondisi ini. Wakil Ketua Komisi IV (bidang pertanian) DPR, Firman Subagyo dan anggota Komisi VI (bidang perdagangan dan industri)

Hendrawan Supratikno menegaskan, kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak pernah menyiapkan secara serius pengendalian harga. “Penyebabnya jelas karena pemerintah tidak pernah menyiapkan secara serius hal-hal yang terkait dengan harga barang pangan. Akibatnya setiap tahun jelang lebaran



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

harga naik, bahkan tahun ini naiknya gila-gilaan,” tandas Firman Subagyo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/7).

Sependapat dengan Firman anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno juga menegaskan, setiap dua bulan sebelum Lebaran harga pasti mulai naik. Ini penyakit tahunan. Siapa yang bermain? Yah spekulasi,” tudingnya. Hal itu bisa terjadi, menurut Hendrawan, karena buruknya manajemen pangan di Indonesia.

Padahal, lanjut Hendrawan, Komisi VI sudah mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengamatan dan tindakan. “KPPU harus mengungkap adanya kolusi dan persekongkolan dengan pejabat. Jika ada penyelewengan, maka harus ditindak,” tandas politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Saat ditanyakan alasan pemerintah pasokan bahan makanan terhambat karena faktor cuaca, menurut Firman tidak sepenuhnya benar. Sebab, sebagai negara tropis, cuaca Indonesia tidak seekstrem Eropa dan Asia Timur. “Kalau cuaca mau disalahkan, bagaimana Eropa dan Jepang yang cuacanya lebih parah dari kita. Sekarang teknologi sudah maju, melibatkan dong BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika),” jelas Firman.

Dikendalikan Negara:

Lebih lanjut Firman mengatakan, naiknya harga bahan pokok sebelum lebaran diawali dari kebijakan peme-

rintah yang menyerahkan harga kebutuhan pokok pada mekanisme pasar. “Pemerintah menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar, akibatnya kita terjebak di globalisasi ekonomi,” katanya. Padahal, lanjut Firman, seharusnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dikendalikan oleh negara. “Pemerintah harusnya punya lembaga ketahanan pangan yang bisa menstabilisasi harga bahan pokok, seperti peran Bulog dulu di Orde Baru,” tutur Firman.

Akibatnya, lanjut Firman, membuat timbulnya kartel di perdagangan Indonesia. Para kartel inilah yang menjadi spekulasi dan bermain sehingga setiap tahun harga pangan melonjak menjelang lebaran.” Ini persoalan serius. Tahun lalu para kartel itu membuat permainan di kedelai. Akibatnya pemerintah bertindak seperti kebakaran jenggot dan kemudian menurunkan pajak dari lima persen ke nol persen. Dampak dari keputusan itu adalah negara kehilangan potensi masukan negara sebesar Rp400 miliar. Belum kerugian lain,” jelas Firman.

Saat itu, Firman mengisahkan, dirinya telah meminta pemerintah untuk berhati-hati. Sebab bisa jadi para kartel akan kembali bermain karena melihat respon pemerintah justru menguntungkan mereka. Kekuatiran tersebut, justru terjadi kembali tahun ini dan bahkan terjadi pada lebih dari satu komoditas. “Hari ini kita kembali menghadapi persoalan sama, cuma komoditasnya berbeda bahkan bertambah. Inilah perilaku kartel itu. Ini disain dari mafia pangan,” tegas Firman.

Menurut Firman, tindakan mafia ini terjadi karena adanya dukungan aparat dan pejabat. Sebab, lanjutnya, jika tidak ada dukungan dari unsur pemerintah, maka hal ini tidak mungkin terjadi setiap tahun. “Ini jelas didukung oknum aparat dan pejabat. Kalau tidak, pasti tidak mungkin seperti sekarang,” katanya. Salah satu contoh, lanjut Firman, ketika usulan mengembalikan fungsi Bulog muncul, ada upaya mempersulit dari sejumlah pihak. “Ini adalah kejahatan ekonomi dimana aparat penegak hukum yang

harusnya mengambil tindakan justru ikut bermain di dalamnya,” ujarnya.

Baik Firman maupun Hendrawan menegaskan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang seharusnya mengawasi praktek monopoli justru tidak bergerak. “Semua seperti tidak berdaya. KPPU tinggal diam, Polisi, Jaksa ataupun KPK tidak mau turun tangan mengambil langkah-langkah. Padahal ini sudah harus diambil tindakan penyelidikan. Sebab korupsi di sini justru lebih berbahaya daripada yang lain, karena langsung berhubungan dengan kebutuhan rakyat,” paparnya.

Keadaan ini diperparah dengan buruknya infrastruktur pertanian maupun jalur logistik di Indonesia. Padahal, lanjutnya, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian telah menelurkan sejumlah UU untuk mendukung tumbuhnya pertanian nasional. “Periode ini kita lahirkan UU Holtikultura, UU Pangan, UU Perlindungan Pemberdayaan Petani, dan UU lainnya. Nah pemerintah tinggal eksekusi, tapi kenyataannya tidak ada penerapan sama sekali,” tutur Firman.

Pemerintah, menurut Firman, tidak melakukan tindakan khusus untuk meningkatkan produk pangan. “Tidak ada langkah pemerintah untuk menyiapkan lahan pertanian.



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno.

Kondisi tanah pertanian terus memburuk, kesejahteraan petani juga tidak kunjung membaik. SDM dan teknologi pertanian tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Tidak ada program nyata dari pemerintah, semua sebatas wacana,” paparnya. Sementara itu, infrastruktur transportasi yang minim,

membuat biaya logistik besar. Akibat dari semua itu, lanjut Firman, jadilah Indonesia menjadi importir pangan terbesar. “Meski impor saat ini jadi solusi, tapi itu baru solusi sementara, sebab akarnya bukan di situ,” ujarnya.

Untuk itu, persoalan ini harus diselesaikan dari akarnya. Sejumlah langkah harus segera dilakukan. Untuk langkah awal, menurut Hendrawan, pemerintah perlu mensosialisasikan dan menenangkan masyarakat agar tidak panik dengan kondisi ini. “Harus ada himbuan, sehingga tidak ada *panic buying*. Jadi minta masyarakat mengendalikan diri,” ucapnya.

Setelah itu, menurut Firman, peme-

rintah harus segera membentuk lembaga ketahanan pangan. “Jadi seperti Bulog zaman Orde Baru. Tapi jangan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tugasnya harus menstabilkan harga sehingga masyarakat tertolong,” usulnya.

Namun untuk itu, menurut Firman, semua *stakeholder* terkait harus mau duduk bersama, utamanya dari pertanian dan perdagangan. Sebab, lanjut Firman, saat ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan seolah berjalan masing-masing. “Kita lihat mereka berjalan sendiri-sendiri. Semua sibuk pencitraan, tidak ada upaya riil untuk mengatasi hal ini. Padahal, masyarakat sedang susah, mereka

justru sibuk ketawa-ketawa di televisi dengan para kartel itu,” katanya.

Hendrawan menambahkan, dibutuhkan ketegasan untuk mengatasi persoalan kartel. Sebab, hanya dengan ketegasanlah perdagangan yang saat ini dimonopoli oleh sejumlah pihak bisa diatasi. “Ini harus ditata. Harus ada manajemen yang tegas,” kata politisi PDIP tersebut. Selain itu, arus logistik harus diperbaiki segera mungkin. Sebab, hal itu akan mempengaruhi struktur biaya. “Jalan-jalan harus diperbaiki, sehingga tidak ada truk yang menginap. Ini akan menekan biaya logistik,” imbuhnya. (mp,tt). Foto: iw/wy/Parle.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung Terima Delegasi Parlemen Vietnam

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo mengemukakan, kedatangan Delegasi Parlemen Vietnam adalah dalam rangka mempererat hubungan kedua negara termasuk dengan parlemen Indonesia. Delegasi Parlemen Vietnam juga menyampaikan beberapa isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik yang terjadi di Vietnam maupun di Indonesia.

“ Saat ini Vietnam dan Indonesia merupakan tempat investasi yang cukup menarik bagi beberapa negara investor. Maka dalam konteks itulah kunjungan ini dilakukan dan memudahkan kunjungan ini juga bisa mempererat hubungan kedua negara yang selama ini sudah cukup baik ,” ungkap Pramono Anung usai pertemuan dengan Delegasi Parlemen Vietnam di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Intinya, lanjut Pramono, Vietnam ingin meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan pemerintah Indonesia. Ketua Delegasi Parlemen Vietnam Nguyen Phu Trong dalam pertemuan tersebut mengatakan, hubungan Vietnam-Indonesia sudah berlangsung cukup lama sehingga perlu ditingkatkan untuk waktu yang akan datang.



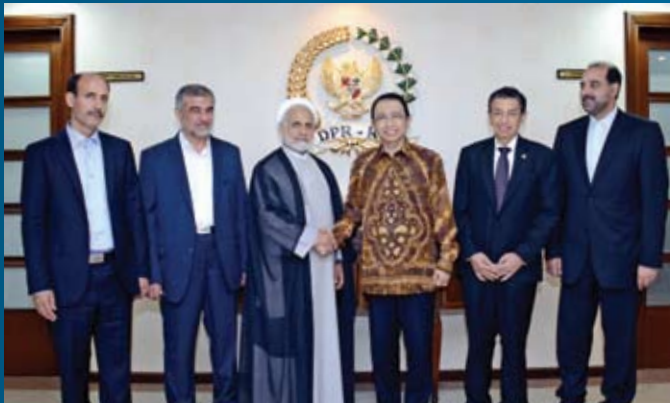
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Delegasi Parlemen Vietnam.

Ketua Delegasi Nguyen Phu Trong juga menyampaikan bahwa mereka sangat terkesan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Kami sangat gembira dengan perkembangan di Indonesia. Indonesia telah berhasil keluar dari krisis termasuk ekonomi makro yang terus meningkat,” kata Nguyen Phu Trong.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara Vietnam dengan China. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik bebas aktif berprinsip bahwa dalam kasus-

kasus sengketa harus diselesaikan dengan cara damai dan menghormati prinsip-prinsip antar kedua negara dan hukum internasional.

Menurut Pramono, selama ini posisi kita cukup strategis dan Indonesia dianggap sebagai negara tertua di ASEAN. Oleh karenanya, saran atau pendapat dari Indonesia akan diperhatikan terkait perkembangan ASEAN dan konflik yang terjadi dikawasan ASEAN dengan Cina sehingga kendalanya relatif kecil. (wy,mp)foto:wahyu/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Delegasi parlemen Iran yang dipimpin Vahid Achmad di gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (24/7). Foto: Odjie/Parle



Tim Kunker Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama meninjau kesiapan Stasiun Cirebon sambut arus mudik Lebaran, Selasa, (23/7). Foto: Sugeng/Parle.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung Terima Delegasi Parlemen Vietnam yang dipimpin Nguyen Phu Trong di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/7) Foto: Wahyu/Parle.